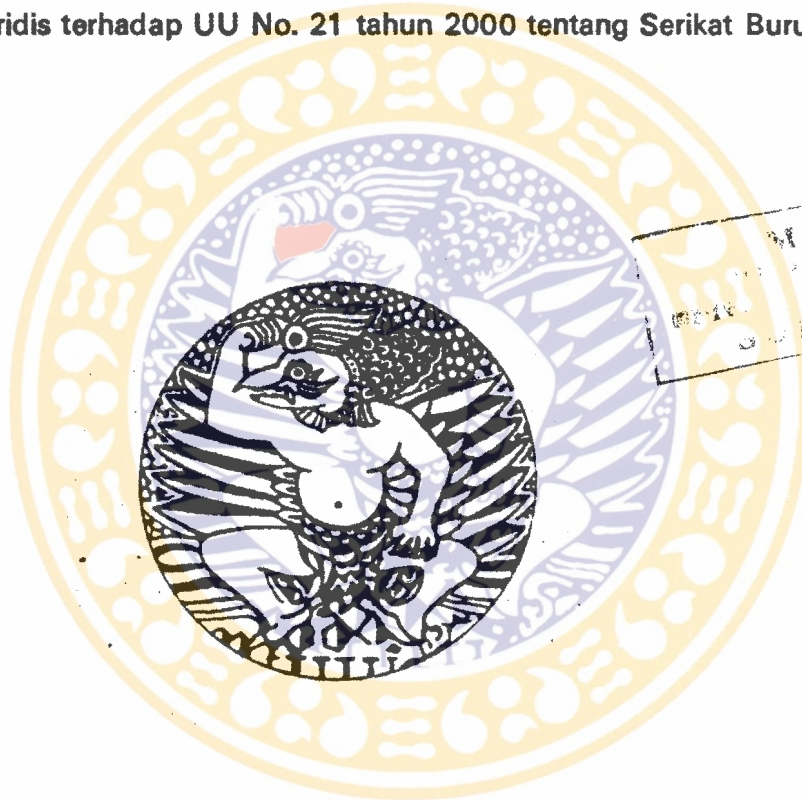


SKRIPSI

FRANS IGNAS RAHDITA

REFORMASI TERHADAP KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI BURUH

(Tinjauan yuridis terhadap UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

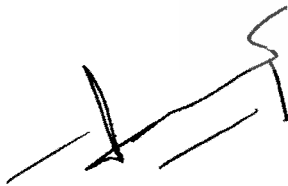
REFORMASI TERHADAP KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI BURUH

**(Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 21 Tahun 2000
Tentang Serikat Buruh)**

SKRIPSI

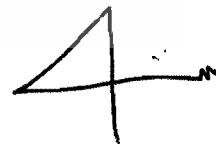
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131 878 388

Penyusun,



Frans Ignas Rahdita
NIM. 039714501

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 8 Januari 2001**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : R. Indiarso, S.H.

Anggota : 1. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

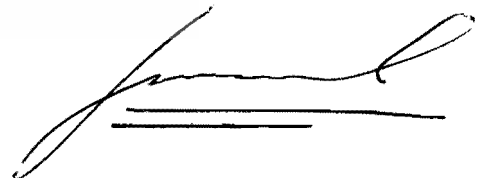
2. Marteen L. Soehoko, S.H., M.S.

3. Machsoen Ali, S.H., M.S.









BAB IV

PENUTUP

Peraturan perundang-undangan sebagai acuan / dasar bagi terlaksananya kepentingan semua pihak tentu tidak lepas dengan konsekuensi hukumnya. Para pihak dituntut secara fair dan sportif dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Maka diakhir penulisan skripsi kami kali ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Berkait dengan kebebasan berserikat bahwa dalam rangka mewujudkan hak dan kebebasan berorganisasi bagi buruh melalui upaya pembentukan serikat buruh dewasa ini, dengan adanya Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh telah mengupayakan perubahan terhadap tatanan demokrasi industri agar tumbuh sehat dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang sehat. Pengaturan kebebasan berorganisasi bagi buruh dalam UU No. 21 tahun 2000 khususnya, maupun peraturan perundang-undangan lainnya tentang hak dan kebebasan berorganisasi telah mengupayakan perbaikan terhadap nasib buruh secara bertahap. Pasal-pasal dalam UU no. 21 tahun 2000 maupun melalui Kepmenaker / Permenaker yang ada menjamin sepenuhnya kebebasan berorganisasi bagi para buruh, memberi perlindungan hukum terhadap kemungkinan



munculnya intervensi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan tumbuhnya demokrasi industri buruh secara sehat.

2. Berkait dengan pelaksanaannya, UU No. 21 tahun 2000 sebagai acuan bagi perwujudan kebebasan berorganisasi bagi buruh membawa konsekuensi hukum tertentu bagi para pihak untuk menaatinya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukumnya. Para pihak disini diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan dan menggunakan haknya masing-masing sesuai dengan norma hukum yang ada sebab misi / kepentingan yang mendasari munculnya hak-hak itu diharapkan bisa terpenuhi. Peran pemerintah melalui pengawas dan aparat hukum sangatlah penting guna menjaga, mengontrol serta membina mereka (buruh) dalam rangka mewujudkan demokrasi didalam hubungan industrial, khususnya berkait dengan keberadaan Serikat Pekerja.

SARAN

Koridor hukum bagi terwujudnya hak dan kebebasan berorganisasi serta berunding bersama harus sepenuhnya dibuka walaupun secara bertahap agar tatanan demokrasi industri tumbuh secara alamiah. Pemerintah melalui organ-organ pengawas dan pembentuk peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan jeli dalam melihat perkembangan kondisi perburuhan yang ada khususnya dalam hal ini menyangkut Serikat Buruh. Pemerintah harus segera meratifikasi berbagai Konvensi ILO, khususnya menyangkut kebebasan berserikat dan mencabut seluruh regulasi yang bertentangan dengan konvensi itu.